



**ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM  
MENERTIBKAN KENDARAAN BERTONASE BESAR DI KOTA  
PEKANBARU**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

OLEH:

**BUDI GUNAWAN**

**11575103005**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2019**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : BUDI GUNAWAN

NIM : 11575103005

FAKULTAS / JURUSAN : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Ilmu Administrasi Negara

JUDUL SKRIPSI : Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Besar di Kota Pekanbaru.

**DISETUJUI OLEH  
DOSEN PEMBIMBING**

Abdiana Ilosa, S.Ap. MPA  
NIP. 19870716 201503 2 003

MENGETAHUI

**DEKAN FAKULTAS**  
Ekonomi dan Ilmu Sosial

**KETUA JURUSAN**  
Ilmu Administrasi Negara

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si  
NIP. 19790101 200710 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : BUDI GUNAWAN  
 NIM : 11575103005  
 FAKULTAS/JURUSAN : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL/ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN KENDARAAN BERTONASE BESAR DI KOTA PEKANBARU  
 HARI/TANGGAL UJIAN : SENIN/18 NOVEMBER 2019


PANITIA PENGUJI  
 KETUA


  
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19790101 200710 1 003

ANGGOTA

PENGUJI I

PENGUJI II

  
DRS.H.Almasri, M.Si  
 NIP. 19670801 200501 1 007

  
Muslim, S.Sos, M.Si  
 19820205 201503 1 002

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## ABSTRAK

### ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN KENDARAAN BERTONSE BESAR DI KOTA PEKANBARU

Oleh:

**BUDI GUNAWAN**

**NIM 11575103005**

*Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru . Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Fungsi Pengawasannya Menertibkan Kendaraan Bertonase Besar dengan Peraturan yang berlaku serta Faktor pendukung maupun penghambat dalam melaksanakan Peran atau kegiatan mulai dari SOP Pengawasannya, Kerjasama dan Sanksi yang di berikan terhadap pelanggar, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Kualitatif dengan Analisis Deskriptif yang didasarkan atas hasil observasi, dokumentasi, wawancara mendalam yang peneliti lakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep operasional .adapun yang menjadi Informan dari penelitian ini antara lain adalah, Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan beliau membawahi seksi manajemen dan kebutuhan lalu lintas, seksi rekayasa dan fasilitas lalu lintas jalan dan perairan, seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas, dan tidak hanya itu informan lainnya antara lain, staff UPTD pengujian kendaraan bermotor, petugas lapangan, pengendara kendaraan bertonase besar, dan masyarakat kota pekanbaru, dan penarikan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan kendaraan bertonase besar sampai saat ini belum maksimal, dikarnaakn dari informasi yang peniliti peroleh, masih banyak sekali kekurangan atau faktor penghambat dari Dinas Perhubungan mulai dari keteledoran petugas lapangan yang tidak berada di tempat jaga yang mengakibatkan sering pengendara yang melanggar baik dari berat muatannya maupun dari dimensi kendaraanya lolos dari pantauan maupun tindakan tilang yang seharusnya dilakukan petugas padahal sudah mealakukan kerjasama dengan BPTD dan Kepolisian namun belum memperoleh hasil yang maksimal, serta sanksi yang di berikan kepada pengendara yang melanggar ketentuan yang masih tergolong rendah seperti denda maksimal Rp 100,000 perkilogram dan hukuman pidana maksimal Empat Bulan.*

**Kata Kunci:** Peran, Dinas Perhubungan, Penertiban, Kendaraan Bertonase Besar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'allaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada terkira. Semoga kita insan yang *dhoif* ini bisa selalu istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam ridha-Nya. Shalawat beriring salam setulus hati kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang reformis agung peradaban dunia yang menjadi *inspiring leader* dan *inspiring human* bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga syafa'atnya kelak menaungi kita di hari perhitungan kelak.

Semua ini tak terlepas oleh-Nya dan tak terkecuali dalam penyusunan skripsi yang penulis lakukan. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul “ **Analisis Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Besar di Kota Pekanbaru**”

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Terima Kasih yang teristimewa Kepada Ayah dan Ibu Saya yang telah membesarkan saya dengan darah, keringat dan air mata yang selama ini mendidik dan memberikan kasih sayang Semoga Ayah dan mamak selalu



di lindungi di berikan keberkahan dan di balas syurga oleh Allah tanpa menyentuh Panasnya Api Neraka sedikitpun Aamiin.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahiddin, S.Ag.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Bapak Dr. Drs. H.Muh. said HM, M.Ag, MM.
4. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Yang terhormat Bapak Muslim S.Sos, M.Si selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk arahan serta bimbingan kepada peneliti.
6. Yang terhormat Ibu Abdiana Ilosa, S.Ap.MPA selaku Dosen pembimbing Proposal dan Skripsi dengan penuh kesabaran yang telah menyediakan waktu dan mengajarkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
7. Yang terhormat Bapak Yuliarso,S.Stp. M. Si, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Beserta Jajarannya.
8. Kepada Rio, Ifan, Agus beserta teman-teman Tim Hore Akreditasi dan para Dosen yang bersangkutan yang telah memberikan Motivasi dalam Penulisan Skripsi ini .
9. Seluruh Dosen dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada peneliti selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Putri Sholehawati sebagai kakak Kandung Penulis yang terus memberikan dukungan beserta motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. Nabila Rahmawati sebagai adik Kandung penulis yang juga memberikan dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Fachrul Auza'i sebagai Gubernur Mahasiswa Fekonsos sekaligus Teman dekat terbaik yang menjadikan penulis pribadi yang lebih baik, serta memberikan dukungan sehingga selesainya skripsi ini.
13. Kepada rekan-rekan BEM FEKONSOS UIN SUSKA Riau dan keluarga besar Administrasi Negara Lokal B 2015 serta sahabat-sahabat Tim KKN Koto Tandun sekalian yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang menjadi semangat kebersamaan.  
 Akhir kata, penulis senantiasa berdoa agar segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT baik yang tampak maupun yang tersembunyi sekalipun.

Pekanbaru, 15 Oktober 2019

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Budi Gunawan  
Nim : 11575103005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

	halaman
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Peran.....	10
2.2 Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	13
2.3 Pelayanan Publik.....	14
2.3.1 Jenis-Jenis Pelayan Publik.....	15
2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelayanan.....	17
2.4 Transportasi.....	22
2.5 Pandangan Islam.....	24
2.6 Penelitian Terdahulu.....	25
2.7 Definisi Konsep.....	25





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Konsep Operasional.....	26
2.9 Kerangka Berfikir.....	25

**BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data .....	29
3.3 Informan Penelitian .....	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.5 Metode Analisis Data .....	33

**BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1 Sejarah Perkembangan Kota Pekanbaru.....	35
4.2 Wilayah Geografis Kota Pekanbaru.....	37
4.3 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	39
4.4 Visi dan Misi Dinas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.....	40
4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.....	41
4.6 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	41

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Bertonase Besar.....	48
5.2 Perizinan Kendaraan Bertonase Besar Kota Pekanbaru.....	62
5.3 Pengawasan Kendaraan Bertonase Besar Kota Pekanbaru.....	68

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulan.....	84
6.2 Saran.....	85

**DAFTAR PUSTAKA .....**



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Panjang Jalan di Kota Pekanbaru.....	2
Tabel 1.2 Kondisi Jalan di Kota Pekanbaru.....	2
Tabel 1.3 Jumlah Kendaraan Bertonase Besar yang melewati Ruas Jalan di Kota Pekanbaru disepanjang Tahun.....	4
Tabel 2.1 Konsep Operasional.....	26
Tabel 3.1 Data Informan dalam Penelitian Tentang Analisis Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase di Kota Pekanbaru.....	31
Tabel 5.1 Data Aturan Muatan/Daya Angkut Kendaraan Untuk Mobil bak muatan terbuka, Mobil bak muatan tertutup dan Mobil Tangki.....	49
Tabel 5.2 Data Aturan Muatan/Daya Angkut Kendaraan Untuk Kereta Penarik dan tempelan.....	50
Tabel 5.3 Jumlah Kendaraan Bertonase Besar yang melewati Ruas Jalan di Kota Pekanbaru disepanjang Tahun 2015-2017.....	55
Tabel 5.4 Rute Kendaraan Bertonase Besar Pada Jalan Umum di Kota Pekanbaru.....	57
Tabel 5.5 Aturan Beban Maksimum Kendaraan dengan penyesuaian kelas jalan.	62
Tabel 5.6 Fasilitas alat Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	64
Tabel 5.7 Standar Pengujian Kendaraan Bermotor.....	65
Tabel 5.8 Jumlah Kendaraan Bertonase besar Wajib Uji 2016-2018.....	67
Tabel 5.9 Jenis Pelanggaran dan Sanksi Kendaraan Truk Bertonase Berat.....	80

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 5.1 Pelanggaran Pengaturan Penetapan Daya Angkut oleh Pengendara yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	2
Gambar 5.2 Spenerapan Program Overloading dan Oeverdimensi.....	26
Gambar 5.3 Penerapan Perizinan dengan menggunakan alat uji kendaraan.....	43



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Jalan merupakan unsur yang menjembatani Kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil Pembangunan di Provinsi Riau, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai dari sistem transportasi nasional harus di kembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembang di suatu wilayah.

Begitu pula dengan prasarana jalan yang berada di kota Pekanbaru, bagi masyarakat Kota Pekanbaru Jalan merupakan Prasarana yang amat di butuhkan, karna memegang peran penting berfungsi sebagai penggerak roda aktivitas seperti ekonomi, pendidikan, sosial dan lain sebagainya, oleh karna itu Pembangunan jalan harus kiranya menjadi pusat perhatian sehingga rasa aman, nyaman dan berdayaguna benar-benar akan di rasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.

Di pekanbaru masih terdapat jalan yang mengalami kerusakan, walaupun kerusakan Jalan tidak begitu banyak tetapi akan sangat mengganggu aktivitas masyarakat di karnakan kepadatan penduduk di wilayah kota pekanbaru itu sendiri, dalam hal itu sudah semestinya pemerintah kota Pekanbaru atau dinas terkait harus bekerja maksimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat seperti prasarana jalan tersebut . Berikut data panjang dan Kondisi Jalan yang di Peroleh dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Panjang Jalan di Kota Pekanbaru 2017

NO	Jenis Jalan	Km	%
1	Aspal	1 518,03	53,69
2	Kerikal	292,67	0,11
3	Tanah	1 013,59	10,35
4	Cor Beton	3,09	35,85
5	Jumlah / Total	<b>2 827,39</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru

Tabel 1.2 Kondisi Jalan di Kota Pekanbaru Tahun 2017

NO	Kondisi Jalan	Km	%
1	Baik	1 553,09	54,06
2	Sedang	308,60	10,74
3	Rusak	1 011,23	35,20
4	Jumlah	<b>2 872,92</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru

Salah satu penyebab terjadinya kerusakan jalan di akibatkan karna dilalui kendaraan bermuatan berat atau bertonase Besar, Berdasarkan Informasi yang didapatkan melalui proses Wawancara dengan Bapak Hendry Tambunan sebagai Koordinator Satuan Pelayanan Terminal TPA Bandaraya Payung Sekaki di Bawah dari Balai Pengelolaan Transportasi Darat yang mengatakan bahwasannya, Pelanggaran Kendaraan Bertonase Besar yang membawa barang Melebihi Batas Muatan yang di tentukan oleh Pemerintah memang sudah menjadi masalah Nasional karna masih banyaknya Pelanggaran yang di temukan,dan tentunya menimbulkan efek Negatif Seperti kerusakan Jalan yang di Sebutkan tadi, namun dengan berbagai upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Seperti upaya Penegakan hukum seperti Penilangan, Pembongkaran dan proses Tindak Pidana, Pelanggaran tersebut saat ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





sudah mulai Berkurang. dan Berikut Data Jumlah Kendaraan Bertonase Besar yang melewati Ruas Jalan di Kota Pekanbaru disepanjang Tahun 2017.

Tabel 1.3 Jumlah Kendaraan Bertonase Besar yang melewati Ruas Jalan di Kota Pekanbaru disepanjang Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Kendaraan Bertonase Besar	%
2015	33.803	41,11%
2016	16.876	20,52%
2017	35.527	43,21%
<b>Total</b>	<b>82,206</b>	<b>100%</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data di atas menunjukkan terdapat banyak Jenis Kendaraan Bertonase besar yang melewati ruas jalan Kota Pekanbaru Walaupun terjadi pengurang di tahun 2016 namun di Tahun 2017 mengalami peningkatan drastis Jumlah Kendaraan yang Melewati Ruas Jalan Kota Pekanbaru sementara permukaan jalan yang sebagian besar pada tahap penimbunan/pengerasan masih belum di aspal, dan sebagian besar dalam kondisi rusak, daya dukung jalan yang masih relatif rendah (maksimal 5-8 ton) karena lapisan dasar pada bawah jalan masih labil berupa tanah gambut. Selain itu pula jika di tinjau dari segi kualitas konstruksi jalan yang belum optimal maka harus ada upaya untuk mengatasi dan mencegah pembebanan berlebih. Secara umum akibat pembebanan muatan yang berlebih menjadikan jalan tidak terpelihara, dengan kerusakan jalan yang hancur sebelum umur teknis jalan tersebut tercapai dan ini pada akhirnya mengganggu seluruh jaringan jalan yang ada di Kota Pekanbaru dan untuk memulihkan jalan agar kembali baik. Hal ini tentunya membutuhkan biaya tambahan untuk mempertahankan fungsi jalan. Jika

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera di atasi maka semakin memperparah kondisi jalan di Kota Pekanbaru.

Kerusakan jalan secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan bertambahnya biaya sosial ekonomi yang di derita oleh pengguna jalan karena jika jalan rusak maka jarak tempuh akan menjadi lebih lama sehingga biaya operasional jalan pun menjadi lebih tinggi, serta akibat tak langsung adalah proses pendistribusian barang menjadi semakin bertambah, bahkan tidak hanya kerusakan jalan saja sebagai efek negatif yang di timbulkan oleh kendaraan bertonase besar seperti terjadinya kemacetan lalu lintas dan meningkatnya angka kecelakaan..

Padahal jalan merupakan penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan di Kota Pekanbaru serta berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Melihat kondisi pelayanan jalan harus optimal maka kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan tentu harus di cegah dan di tangani secepatnya agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.

Melihat realitas dari dampak negatif dari pengangkutan hasil tambang dan perusahaan perkebunan maka sudah saatnya Pemerintah Khususnya Pemerintah kota Pekanbaru atau Dinas Terkait yang Tugas Pokok dan Fungsinya yang mengarah ke Dinas Perhubungan yang tertera dalam Perda No 7 Tahun 2005 Pasal 14 yang berbunyi, Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelanggaran kelebihan muatan menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan, yaitu dengan melakukan tindakan Pencegahan ataupun Pengurangan efek Negatif yang di timbulkan oleh Kendaraan Bertonase atau Bermuatan Besar yang di antara lain dengan melakukan pengaturan, Pembinaan, perekrayasaan, pemberdayaan dan pengawasan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasir

terhadap jalan di Kota Pekanbaru , maka upaya menata penggunaan jalan untuk pengangkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan kiranya perlu juga menjadi perhatian sehingga menjadi terpadu dengan pengelolaan jalan yang telah ada sebelumnya.

Tidak hanya itu Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diterapkan melalui sistem pengawasan sesuai yang didasarkan pada peraturan daerah Provinsi Riau tersebut dengan mekanisme atau standar operasional prosedur pengawasan meliputi:

- 1) Melakukan pemantauan (pos pengawasan) pada setiap pintu masuk Kota Pekanbaru.
- 2) Memeriksa pemegang izin/ pemilik kendaraan muatan barang harus memenuhi kewajiban/ketaatan pengguna jalan umum untuk kendaraan muatan barang.
- 3) Melakukan penimbangan, pelanggaran muatan dikenakan sanksi berupa pembongkaran muatan. (Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib mendaftarkan jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan).

Pengaturan penggunaan jalan (Perda No.5 tahun 2013) dijelaskan bahwa pengaturan penggunaan jalan umum, yaitu:

- 1) Setiap kendaraan bermotor angkutan baik angkutan hasil tambang, hasil perkebunan, hasil kehutanan dan lain-lain diperbolehkan diangkut melalui

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalan umum dengan ketentuan tidak melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) jalan yang sudah ditetapkan melalui peraturan yang berlaku.

Apabila terdapat kendaraan bermotor angkutan yang bebannya melebihi Muatan Sumbu Terberat yang diizinkan, pihak pengangkut wajib membongkar kelebihan beban tersebut pada tempat yang telah ditentukan.

Pemerintah Daerah wajib membuat tempat penampungan pembongkaran kelebihan muatan kendaraan angkutan disetiap jembatan timbang yang berada dalam wilayahnya.

Dalam hal pembongkaran kelebihan muatan kendaraan bermotor angkutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, maka dikenakan retribusi.

Upaya pemerintah dalam melaksanakan pengawasan didahului melalui tindakan preventif berupa, sosialisasi baik melalui media cetak, pamflet dan himbuan kepada para pengusaha angkutan barang secara berkelanjutan tentang kepatuhan terhadap kewajiban penggunaan jalan bagi kendaraan barang/ muatan berbonase. Selain itu, bentuk sanksi administrasi yang dikenakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 23, Perda No. 5 Tahun 2013 berupa; surat peringatan untuk pelanggaran ringan yang baru dilakukan sekali, dan paksaan dalam bentuk perintah menghentikan kendaraan yang diindikasikan melanggar sebelum masuk jalan umum, pemerintah memperbaiki prasarana dan prasarana umum dari akibat pelanggaran yang dilakukan bahkan dapat berupa penghentian sementara operasional angkutan di jalan umum, penangguhan izin, serta pencabutan izin



Dan juga sebagai salah satu upaya dalam menangani masalah tersebut adalah dengan di susunnya Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimana ada hal yang di gariskan dalam Peraturan daerah tersebut bahwa pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu bertujuan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penggunaan jalan, mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu, mewujudkan pelayanan jalan yang handal dan prima .

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan , implementasi atau penerapam sering di anggap hanya merupakan peleaksanaan yang telah di putuskan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh, akan tetapi dalam kenyataannya tahapan implementasi berpengaruh penting karna suatu kebijakaan tidak berarti apa-apa jika tidak dapat di laksanakan dengan baik dan benar, dengan kata lain implementasi merupakan tahapan dimana suatu kebijakan di laksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Untuk itu perlu upaya terpadu dalam mengimplementasikan peraturan tersebut untuk mengurangi dan sedapatnya menghilangkan pembebanan muatan lebih dari kendaraan berat yang mengangkut hasil tambang, hasil perkebunan atau Perusahaan lainnya. Di karnakan kerusakan jalan maka secara langsung dan tidak langsung telah menyebabkan bertambahnya biaya sosial ekonomi yang di derita oleh pengguna jalan karna jika jalan rusak maka jarak tempuh akan menjadi lebih tinggi , serta akibat tak langsung sudah proses pendistribusian barang menjadi semakin bertambah.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Terkait implementasi kebijakan tersebut Dalam hal ini penulis ingin meneliti salah satu bagian dari Organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan implementasi Undang-Undang ataupun Peraturan Daerah yang berlaku di kota Pekanbaru tentang Penertiban kendaraan bertonase besar, dan di sini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai peranan Dinas Perhubungan dalam menertibkan kendaraan bertonase besar yang mengakibatkan berdampak buruk seperti kerusakan di sebagian ruas jalan kota Pekanbaru, apakah dalam pengimplementasiannya Karna Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Memiliki Peran dari Segi Pengaturannya seperti Menetapkan Daya Angkut, Melakukan Pemasangan Rambu-Rambu dan dan melakukan Perekayasaan Lalu Lintas dan tidak hanya itu Dinas Perhubungan Juga Berperan dalam Mengawasi Jika ada Pelanggaran yang dilakukan Pengendara Bertonase Besar yang membawa kendaraan melebihi batas tonase atau muatan yang ditentukan dengan melakukan penimbangan di Jembatan Timbang yang sudah disediakan oleh Dinas Perhubungan, dalam hal ini Peneliti ingin menganalisis apakah sudah berjalan baik atau malah sebaliknya, maka dari itu penulis mengemukakan judul penulis yaitu **“Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Besar di Kota Pekanbaru”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas perhubungan kota pekanbaru dalam Fungsi Pengawasannya untuk menertibkan kendaraan Bertonase Besar di kota pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Memberikan penjelasan Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan Kendaraan Bertonase Besar di Kota Pekanbaru.
2. Memberikan penjelasan mengenai faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan Penertiban kendaraan bertonase besar di Kota Pekanbaru oleh Dinas Perhubungan.
3. Memberikan penjelasan mengenai payung hukum atau landaan dalam pelaksanaan penertiban kendaraan bertonase besar di kota pekanbaru oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
4. Memberikan penjelasan mengenai dampak yang di timbulkan dari peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Menertibkan Kendaraan Bernotase Besar di Kota Pekanbaru.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, untuk mengembangkan disiplin Ilmu Sosial khususnya dan disiplin Ilmu Administrasi Negara dalam masalah pelayanan dan Implementasi kebijakan.
2. Bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, untuk dijadikan dan informasi yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Kota Pekanbaru.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

3. Bagi peneliti lanjutan, untuk dapat dijadikan sumber referensi dan perbandingan pada aspek yang serupa dimasa yang akan datang.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan ini akan dipaparkan dalam enam pokok bahasan, dan dari masing-masing pokok bahasan akan dibagi ke dalam sub-sub sebagai berikut:

### 1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

### 2. BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan teori yang berkaitan dengan penelitian.

### 3. BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan dimana lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel yang penulis teliti, teknis analisis data yang penulis gunakan.

### 4. BAB IV : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai sejarah dan luas wilayah, letak wilayah, geologi iklim, pendidikan, kesehatan, agama, struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

### 5. BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab V hasil penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian tentang Peran Dinas Perhubungan dalam menyetibkan Kendaraan Bertonase

Besar di Kota Pekanbaru yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini.

## 6. BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, saran bagi peneliti selanjutnya saran bagi instansi lain.



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengawasan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Murhaini (2014:1), pengawasan berasal dari akar kata “awas” mendapat awal “an” dan akhiran “an” artinya adalah penilikan dan penjagaan. Didalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat maupun di lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan makna pengawasan ini agaknya tidak terlalu sulit untuk di pahami. Akan tetapi untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit diberikan . Bahkan para ahli manajemen, tidak mudah untuk memberikan pemahaman dengan bahasa konkrit tentang pengawasan hal ini disebabkan bahwa masing-masing memberikan pemahaman berdasarkan persepektif yang tidak sama. Hal ini disebabkan objek yang dimana tidak sama, sehingga menghasilkan bahasa yang mewakili pemahaman yang tidak sama pula. Kendati pun secara umum dapat ditemukan persamaan atas pengertian manajemen itu sendiri.

Menurut Saiful Anwar dalam Murhaini (2014:3) memberikan pemahaman bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah di tetapkan dapat mecapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan. Oleh karena penyimpangan itu terjadi tidak semata karena tidak ada atau lemahnya pengawasan. penyimpangan dapat terjadi karena kesengajaan. Sengaja karena ada kesempatan dan niat untuk melakukan penyimpangan.



Terwujudnya pengawasan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karenanya pengawasan sangat mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir maksud pengawasan adalah untuk:

- a. Mengetahui jalanya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
- b. Memperbaiki kesalah-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- c. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standar.

Menurut Rachman dalam Situmorang 1994:22, juga mengemukakan tentang maksud pengawasan yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar. Dari kedua pernyataan tersebut dapat diartikan maksud pengawasan ialah untuk mengetahui proses, hasil dan segala sesuatunya apakah berjalan sesuai kesepakatan yang sudah dilakukan pada awalnya atau peraturan yang sudah disepakati bersama, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki menjadi yang lebih baik.

## 2.2 Penertiban

Kata penertiban berasal dari kata dasar tertib, yang diberi awalan pe- dan akhiran -kan yang berarti aturan atau peraturan yang baik. Di dalam peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman polisi pamong praja, yang dimaksud penertiban adalah “Tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib teratur dalam menciptakan ketahanan nasional.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### 2.3 Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota No 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Pada (Pasal 3) yakni:

1. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  - a. Kepala Dinas Perhubungan
  - b. Sekertaris, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum
    - 2) Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Angkutan, membawahi :
    - 1) Seksi Angkutan Jalan.
    - 2) Seksi Angkutan Barang, Terminal dan Perairan
    - 3) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Angkutan.
  - d. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Membawahi:
    - 1) Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan
    - 2) Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan.
    - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan.
  - e. Bidang Keselamatan, Teknik Saran dan Prasarana, membawahi:
    - 1) Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Lalu Lintas Jalan.
    - 2) Seksi Penerangan Jalan.
    - 3) Seksi Teknik Keselamatan Jalan dan Perairan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.4 Pelayanan Publik

Pelayanan berkaitan erat dengan masyarakat. Sehingga pelayanan lebih dikenal dengan istilah pelayanan publik. Publik berasal dari bahasa Inggris “*Public*” yang berarti masyarakat umum dan negara, kata publik dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai umum, orang banyak dan ramai.

Menurut Agus Dwiyanto (2015: 141) pelayanan publik adalah “serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna”. Sementara itu, menurut Jeremias T Keban (2008:60) bahwa para pakar terkesan tidak seragam dan mungkin seringkali membingungkan para mahasiswa yang mempelajarinya. Keban, mengutip pendapat Lemay, berkesimpulan bahwa “kebijakan publik berkisar pada kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah”.

Pelayanan publik sering dilihat sebagai representasi dari eksistensi birokrasi pemerintah, karena pelayanan publik bersentuhan langsung dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Menurut undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Nina Rahmayanty (2013: 85) adalah, “segala kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh penyelenggara

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



elayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

#### 2.4.1 Jenis-jenis Pelayanan Publik

Peningkatan pelayanan publik mengandung makna adanya perubahan mutu, kondisi, dari keadaan sekarang ke mutu yang lebih baik. Jadi kualitas dalam peningkatan pelayanan publik bersifat dinamis menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadikan hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Menurut Ratminto dan Atik (2015: 9) bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu :

1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik.
2. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh privat dapat dibedakan lagi menjadi :
  - a. yang bersifat primer dan
  - b. yang bersifat sekunder.

Terdapat beberapa perbedaan di antara jenis pelayanan publik atau pelayanan umum yang tentunya sangat berguna untuk memudahkan dalam memahami jenis-jenis dari pelayanan public. Jenis-jenis yang dimaksud antara lain :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh privat. Ini adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik swasta.
2. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat primer. Ini adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan.
3. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat sekunder. Ini adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus memergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan, misalnya program asuransi tenaga kerja, program pendidikan dan pelayanan yang diberikan oleh BUMN.

Pemaparan di atas dapat dipahami bahwa pelayanan publik memiliki ruang lingkup yang luas. Selain itu juga masih terdapat beberapa jenis-jenis pelayanan publik lainnya seperti yang dipaparkan menurut Lembaga Administrasi Negara (SANRI Buku III 2004: 85) antara lain :

1. Pelayanan pemerintah adalah jenis pelayanan masyarakat yang terikat dengan tugas-tugas umum pemerintah, seperti pelayanan KTP, SIM, Pajak, Perizinan, dan Keimigrasian.
2. Pelayanan pembangunan adalah suatu jenis pelayanan masyarakat yang terikat dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga negara. Pelayanan ini meliputi penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan, dan lain sebagainya.

3. Pelayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat seperti penyediaan listrik, air, telepon, dan transportasi lokal.
4. Pelayanan sandang, pangan dan papan adalah jenis pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil, dan perumahan murah.

Berdasarkan pemaparan dari jenis-jenis pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, dapat dipahami bahwa terdapat banyak jenis dari pelayanan public seperti ;pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, pelayanan pemerintah, pelayanan pemangunan, pelayanan utilitas, pelayanan sandang, dan pelayanan kemasyarakatan. Dari jenis-jenis pelayanan pelayanan tersebut, artinya pelayanan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, oleh sebab itu pemerintah sebagai instansi penyediaan pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

#### 2.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan

Pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Pelayanan yang optimal pada akhirnya juga akan mampu meningkatkan *imagedi* dalam suatu struktur organisasi sehingga citra organisasi di mata masyarakat terdandang baik dan terus mengalamitahap peningkatan. Dengan adanya citra organisasi yang baik, maka segala yang dilakukan oleh organisasi akan dianggap baik pula oleh masyarakat. Akan tetapi, dengan sudah mendapatkan



pandangan yang baik di mata masyarakat bukan berarti suatu organisasi dapat berantai dengan keadaan diam, tetapi juga memikirkan strategi untuk melahirkan inovasi terbaru. Moenir (2014: 88-119) berpendapat bahwa terdapat faktor-faktor yang saling mempengaruhi suatu proses pelaksanaan pelayanan yaitu :

1. Faktor Kesadaran

Kesadaran menunjukkan suatu keadaan pada jiwa seseorang yaitu merupakan titik temu dari berbagai pertimbangan sehingga diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati, dan keseimbangan dalam jiwa yang bersangkutan.

2. Faktor Aturan

Aturan merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang. Peran aturan harus dibuat, dipatuhi, dan diawasi sehingga dapat mencapai sasaran sesuai dengan tujuan.

3. Faktor Organisasi

Organisasi yang dimaksud tidak semata-mata dalam perwujudan susunan organisasi melainkan lebih banyak pada pengaturan dan mekanisme yang harus mampu menghasilkan pelayanan yang memadai.

4. Faktor Pendapatan

Penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk organisasi, baik dalam bentuk uang maupun fasilitas dalam jangka waktu tertentu.

5. Faktor Keterampilan dan Kemampuan

Kemampuan berasal dari kata dasar maupun yang dalam hubungan dengan pekerjaan berarti dapat melakukan pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





jasa, sedangkan keterampilan ialah kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan anggota badan dan peralatan kerja yang tersedia. Keduanya sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan suatu pelayanan sebab keduanya sangat berguna dalam menjalankan pelaksanaan.

## 6. Faktor Sarana Pelayanan

Segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan.

Setelah mengetahui faktor-faktor dari yang mempengaruhi menurut Moenir (2014: 88-119). Terdapat juga identifikasi mengenai kualitas pelayanan menurut Ateya Barata (2016: 37) berdasarkan dua faktor yang saling mempengaruhi yaitu internal dan faktor eksternal, masing-masing bagian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang cukup penting yaitu:

1. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan internal (interaksi pegawai organisasi), pola manajemen umum organisasi, penyediaan fasilitas pendukung, pengembangan sumber daya manusia, iklim kerja dan keselerasan hubungan kerja, serta pola insentif.
2. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan eksternal (pelanggan eksternal), yaitu pola pelayanan dan tata cara penyediaan layanan, pola layanan dalam penyampaian jasa.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa proses penentuan suatu kualitas pelayanan yang diberikan merupakan penilaian dari penerima jasa berdasarkan sudut pandang dan persepsi pelanggan atas jasa pelayanan yang didapatkan. Persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan merupakan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penilaian menyeluruh dari suatu penilaian pelayanan yang diberikan sehingga dapat dikatakan bahwa suatu pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang berdasarkan pada kepuasan pelanggan. Jika suatu kepuasan tercipta maka persepsi suatu pelayanan yang berkualitas akan tumbuh.

Terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan terhadap pelayanan. Faktor-faktor tersebut dikutip melalui pendapat Gasperz (M. Nasution 2005: 50) yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan terhadap pelayanan terdiri dari empat macam yaitu :

1. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan pelanggan ketika ia sedang mencoba melakukan transaksi dengan perusahaan.
2. Pengalaman masa lalu ketika menggunakan jasa dari perusahaan.
3. Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan menceritakan tentang kualitas pelayanan yang akan diterimanya.
4. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap jasa yang akan diterimanya.

Melalui uraian tersebut, dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan banyak faktor lainnya yang saling mempengaruhi seperti ; sumber daya manusia, kesadaran, aturan, organisasi, keterampilan dan kemampuan, sarana pelayanan, serta pengalaman pelanggan. Selain itu faktor internal dan eksternal juga menjadi penting dan berpengaruh dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas bagi setiap pengguna.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.5 Transportasi

Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan Industrialisasi. Dengan adanya transportasi menyebabkan, adanya spesialisasi atau pemagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat, dan budaya suatu bangsa atau daerah.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau bangsa tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam negara atau bangsa yang bersangkutan. Suatu barang atau komoditi mempunyai nilai menurut tempat dan waktu, jika barang tersebut di pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain .

Dalam hal ini, dengan menggunakan transportasi dapat menciptakan suatu barang/komoditi berguna menurut waktu dan tempat (Time utility and place utility).

Dalam transportasi kita melihat dua katogori yaitu:

- a. Pemindahan bahan-bahan dan hasil-hasil produksi dengan menggunakan alat angkut.
- b. mengangkut penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Guna mempelajari transportasi secara mendalam, perlu diketahui makna dari sistem transportasi (Transportation System). Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa definisi transportasi sebagai berikut:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam transportasi terlihat ada dua unsur yang terpenting yaitu:

- a. Pemindahan/pergerakan (movement)
- b. Secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke tempat lain.

### 1. Pembagian Fungsi Transportasi.

Di dalam mempelajari transportasi dapat kita golongkan atas dua bagian:

- a. Angkutan Penumpang, Untuk angkutan Penumpang digunakan mobil/kendaraan pribadi dan alat angkutan lainnya.
- b. Selain mobil pribadi yang digunakan untuk mengangkut penumpang, digunakan pula kendaraan untuk angkutan umum seperti bus, pesawat udara, kereta api, kapal laut, kapal penyebrangan dan pelayaran samudra Luar Negeri.

Dalam masyarakat untuk transportasi nasional lebih banyak digunakan pengangkutan barang daripada angkutan penumpang.

Terutama untuk negara yang sedang membangun, pengangkutan muatan lebih penting dalam dunia bisnis dan perdagangan.

### 2. Peranan Transportasi

Transportasi mempunyai pengaruh besar terhadap perorangan, masyarakat pembangunan ekonomi, dan sosial politik suatu negara. Pengangkutan merupakan



sarana dan prasarana bagi pembangunan ekonomi negara yang bisa mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi (Rate of Growth).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Transportasi dan Kehidupan Masyarakat.

Transportasi bermanfaat bagi masyarakat, dalam arti hasil-hasil produksi dan bahan-bahan baku suatu daerah dapat dipasarkan kepada perusahaan industri. Hasil-hasil barang jadi yang diproduksi oleh pabrik dijual oleh produsen kepada masyarakat atau perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang pemasaran. Untuk mengangkut bahan-bahan baku dan barang-barang jadi dibutuhkan jasa-jasa transportasi (darat, laut, dan udara).

b. Spesialisasi Secara Geografis

Tiap-tiap daerah mempunyai kekhususan dalam arti spesialisasi yang berbeda untuk masing-masing daerah dan wilayah.

Contoh: hasil kerajinan Tasikmalaya, Yogyakarta, Kalimantan, Palembang berbeda untuk tiap-tiap daerahnya.

Hasil-hasil suatu daerah yang dikarenakan spesialisasi secara geografis tersebut, akan dapat dijual atau dipasarkan, bila tersedia alat pengangkutan yang cukup serta memadai.

c. Produksi yang Ekonomis

Suatu produksi akan bermanfaat dan ekonomis, bila tersedia cukup modal transportasi, ada kaitannya transportasi dengan produksi dalam arti untuk pelepasan komoditi tersebut ke pasar (market)

Di sini kelihatan ada hubungan transportasi dengan produksi:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dengan tidak tersedianya transportasi masyarakat tidak akan mengancam keuntungan dari produksi.
- b. Oleh karena itu, harus di usahakan pemanfaatan alat angkut seefektif dan seefisien mungkin.
- c. Dengan efektif dan efisien pengelolaan moda transportasi akan memberikan dampak makro dan mikro Pembangunan Ekonomi.
- d. Pembangunan Nasional dan Hankamnas

Selain peranan transportasi tersebut di atas, hal yang sangat penting bagi negara Indonesia adalah:

- a. Pembangunan Nasional dan Pembangunan seluruh wilayah Indonesia serta pemerataan pembangunan.
- b. Pertahanan dan ketahanan Nasional bangsa Indonesia (Hankamnas)

Di samping Transportasi menciptakan dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

## 2.6 Pandangan Islam

Pandangan Islam mengenai Tata Tertib

Q. Al-Anfal Ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ





Artinya

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*

QS An-nisaa' Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
 إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian-Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Berikut beberapa penelitian yang masih dijadikan acuan dalam penelitian ini antara lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Gesaki Datia Anugerah** dengan judul Pengawasan Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru, dalam skripsinya tersebut penelitian ini cenderung mengulas tentang Pengawasan Terhadap Truk Bertonase Besar Oleh berbagai elemen Pemerintah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perbedaan dalam Penelitian Ini Mulai dari Objek Penelitian yang lebih terfokus Mengenai Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru serta dari Indikator yang lebih luas mulai dari Pengaturan, Perizinan serta Pengawasan terhadap Kendaraan Bertonase Besar.

## 2.8 Definisi Konsep

Dalam hal ini Penulis mengemukakan definisi dari konsep yang akan di pergunakan.

### 1. Peran Dinas Perhubungan

Merupakan suatu pola kerjasama yang dinamis dan kompetitif yang ada dalam Dinas Perhubungan dengan harapan agar terciptanya keberhasilan pelaksanaan pekerjaan.

### 2. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah, kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

### 3. Implementasi Kebijakan

implementasi adalah menghubungkan antara tujuan kebijakan terhadap realisasi dengan hasil kegiatan pemerintah dimana implementasi mengacu kepada menghasilkan output dan outcome yang kongruen dengan maksud awalnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 4. Transportasi

Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dimana transportasi memiliki Peranan yang sangat penting bagi lajunya pertumbuhan Ekonomi, Sosial maupun Politik bagi suatu wilayah atau Negara, dan yang penulis bahas disini adalah suatu jenis kendaraan darat yang memiliki tonase atau beban yang berat.

### 2.6 Konsep Oprasional

Dalam suatu penelitian, keberadaan sifinsi konsep oprasional di gunakan untuk membantu peneliti dalam mengoptimalkan konsep-konsep atau menjalankan variabel-variabel baik variabel independen maupun dependen ke dalam indikasi-indikasi sehingga akan membantu dan mempermudah peneliti dalam mencari gejala-gejala di mana variabel di ukur.

Tabel 2.1 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Besar di Kota Pekanbaru	1. SOP Pengawasan	1. Pengawasan Daya Angkut Kendaraan 2. Pengawasan Jalur Lalu Lintas 3. Pemeriksaan Buku Uji Kendaraaan
	2. Pembinaan	1. Sosialisai Peraturan yang berlaku.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

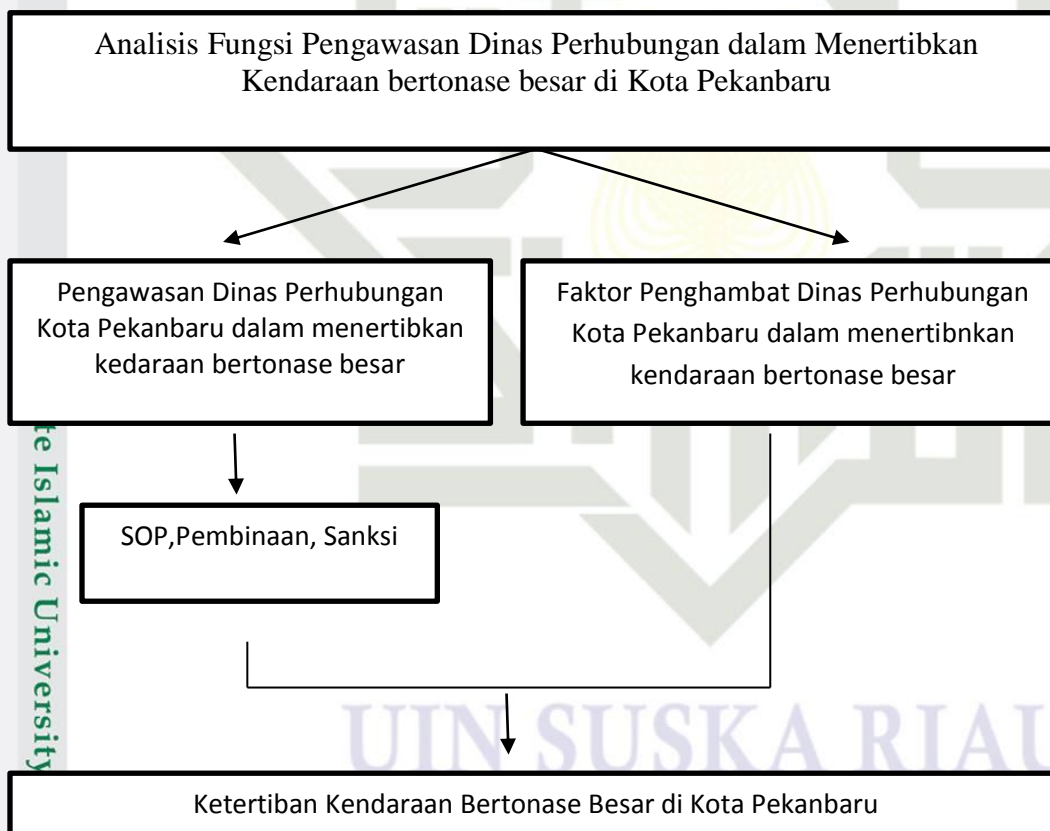


© Hak cipta milik UIN Suska Riau	3. Kerjasama	1. Balai Pengelola Transportasi Darat dan Kepolisian
	4. Sanksi	1. Sanksi Pelanggaran Kendaraan Bertonase Besar

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

## 2.10 Kerangka Berfikir :

Kerangka pemikiran disini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator-indikator yang terkait di dalam variabel penelitian, Berikut adalah kerangka berfikir penelitian Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Kendaraan Bedar di Kota Pekanbaru.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan mencari data suatu masalah, diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah yaitu metode penelitian yang sesuai dengan yang akan diteliti. Suatu metode merumuskan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Jadi suatu metode dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan keserasian dengan obyeknya serta metode yang digunakan sejalan dengan tujuan, sasaran, variabel, dan masalah yang hendak diteliti. Sedangkan metode penelitian menguraikan secara teknik apa yang digunakan dalam penelitiannya.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penelitian ini dimulai dari pengajuan sudut pada bulan tertentu, kemudian selanjutnya penulisan proposal yang dilakukan pada bulan tertentu hingga dianggap layak untuk diseminarkan.

#### 3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi dan wawancara mendalam yang peneliti lakukan serta memberikan argumentasi terhadap



apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep operasional dan peraturan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 3.2.1 Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dari narasumber yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer yang diperoleh dari informan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian, baik melalui observasi maupun wawancara. Data primer ini diperoleh dari :

- a. Melakukan wawancara dengan informan penelitian terkait masalah penelitian pelaksanaan program indonesia pintar oleh dinas pendidikan provinsi riau pada tingkat sekolah menengah atas dan kejuruan di kota pekanbaru.
- b. Melalui observasi lapangan yang dilakukan peneliti pada Kantor Dinas Pendidikan provinsi Riau, Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Di Kota Pekanbaru.

### 3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan pelengkap atau penunjang data primer dikumpulkan dari data yang sesuai. Data sekunder ini meliputi dokumentasi berupa rekaman suara dan foto-foto sebagai bukti penelitiann ini benar dilakukan.

### 3.3 Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling dimana peneliti memilih key informan dan informan yang peneliti anggap





mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai key informan yang paling mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan dari pelaksanaan program indonesia pintar oleh dinas pendidikan provinsi riau pada tingkat sekolah menengah atas dan kejuruan di kota pekanbaru.

Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini yaitu :

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi peneliti. Subyek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015:300). Dimana peneliti memilih *key informant* dan informan yang peneliti pilih adalah yang dianggap mengetahui tentang permasalahan penelitian.

Sebagai *key informant* yang paling mengetahui Peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan kendaraan bertonase besar di kota Pekanbaru .Adapun yang akan menjadi informan yang memberikan informasi keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah:

**Table 3.1 Data Informan dalam Penelitian Tentang Analisis Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase di Kota Pekanbaru**

No	Nama	Status
1	Edi Sofyan.	Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
2	Nurul Prihartini	Staff UPTD Uji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
3	Hendri Tambunan	Koordinator Satuan Pelayanan Terminal TPA Bandaraya Payung Sekaki
4	Amin Laksamana	Petugas Lapangan Badan Pengelolaan Transportasi Darat Provinsi Riau
5	Hendra Purwandi	Pengendara Kendaraan Bertonase Besar
6	Herman Saragih	Pengendara Kendaraan Bertonase Besar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7.	Bagas	Pengendara Kendaraan Bertonase Besar
8.	Wahyu	Pengendara Kendaraan Bertonase Besar
9.	Karyono	Pengendara Kendaraan Bertonase Besar
10.	Anton Juliansyah	Pengendara Kendaraan Bertonase Besar
11.	Wawan Sepriadi	Masyarakat Kota Pekanbaru
12.	Anhar	Masyarakat Kota Pekanbaru
13.	Retno Wulandari	Masyarakat Kota Pekanbaru
14.	Anggi Alfira	Masyarakat Kota Pekanbaru

Sumber: Hasil Observasi 4-17 September 2019

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang direncanakan untuk dilapangan adalah sebagai berikut :

#### 3.4.1 Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktiivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis (Idrus, 2009:101). Pengamatan dalam penelitian ini dapat dilakukan secara terlibat maupun non terlibat. Maksudnya pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang menjadi sasaran penelitian tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan.

#### 3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2006:180). Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung merupakan suatu bentuk komunikasi atau percakapan untuk memperoleh informasi. Peneliti akan secara langsung melakukan wawancara dengan pemberi informasi yaitu orang yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dianggap paham dan mengetahui masalah yang akan diteliti dengan menggunakan daftar pertanyaan. Wawancara akan dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun penulis sebagai acuan untuk mencari informasi, namun sifatnya tidak mengikat sehingga banyak pertanyaan yang baru muncul ketika wawancara yang terkait Pengawasan Kendaraan Bertonase Besar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

### 3.4.3 Studi Dokumentasi

Menurut Arikunto (2007:231) dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, arsip, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.

### 3.5 Metode Analisis Data

Analisis merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang ada. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif deksriptif data yang dikemukakan oleh sugiono (2005:60). Berikut ini adalah beberapan tahapan yang dipakai untuk menganalisa data :

#### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan difokuskan pada pelaksanaan pengawasan kendaraan bertonase besar oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat dilapangan disajikan kedalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya dilapangan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data berkenaan dengan pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap kendaraan bertonase besar maka ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori yang pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Perkembangan Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut). Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun di kampung bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang.

Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Mada Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazam syah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Palabuhan Pekanbaru sekarang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Jalil Muazam syah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhamad Ali Abdul Jalil Muazam syah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar, mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar , Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya Pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan.

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 10 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar kiri dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Peknbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang diKepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut haminta atau Kota B.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota kecil.
  6. UU No 8 Tajun 1956 menyempurnakan status Kota Peknbaru sebagai Kota Kecil.
  7. UU No 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Peraja
  8. Kepemendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Provinsi Riau.
  9. UU No 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan kota madya Pekanbaru.
  10. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kota Madya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

#### 4.2 Wilayah Geografis Kota Pekanbaru.

##### 1. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antar 5-11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemeritah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km<sup>2</sup> menjadi ± 446,50 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 kelurahan/Desa dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 Km<sup>2</sup>.

Dengan meniggalkan Kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya, untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru N0. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

## 2. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

## 3. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambag, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur Perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

## 4. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C-35,6°C dan suhu minimum antara 20,2°C-23,0°, curah hujan antara 38,6-435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar:

- a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari a/d April dan September s/d Desember.



- b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus

Kelembapan Maksimum antara 96%-100% Kelembapan minimum antara 46%-62%.

#### 4.3 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 Oktober 1988 sesuai dengan surat keputusan menteri perhubungan sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat di sektor perhubungan baik darat, laut dan Udara dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia Khususnya Kota Pekanbaru sebagaimana yang tertuang dalam tujuan perhubungan Nasional, Dinas ini dulunya bernama Dinas LLAJ ( Lalu Lintas Angkatan Jalan), kemudian adanya UU No.22 tahun 1999 dan PP No.25 tahun 2000 yang menjadu dasar dari Otonomi daerah, terbitlah Perda No.7 tahun 2001 membuat Dinas ini berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Penyempuranaan UU No. 22 tahun 2007, PP No 41 tahun 2007, Perda No. 8 tahun 2008 dan Perwako No.8 tahun 2009 akhirnya mengganti nama Dinas ini menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru atau Dishubkominfo Kota Pekanbaru. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dimana penyelenggara otonomi daerah adalah pelimpahan kekuasaan pemerintah, Pemerintah Pusat kepada Pemernitah Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau





otonomi dan tugas pembentukan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta untuk melaksanakan wewenang serta tanggung jawab yang di berikan oleh Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi.

Bidang Perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah, selain itu ciri utama aktivitas transportasi adalah tidak mengenal batas wilayah administrasi sehingga secara sistematis penyelenggaraannya tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif.

#### **4.4 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.**

Adapun yang menjadi Visi dan Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

##### **a. Visi**

“Terwujudnya tingkat kualitas pelayanan dan penyediaan jasa Transportasi, Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau”, visi ini mempunyai makna : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya mempetahankan pelayanan yang sudah diberikan, juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan berkelanjutan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan, serta selalu berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aspirasi pemerintah kota pekanbaru.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, maka Visi tersebut dijabarkan menjadi empat buah Misi yang diemban yaitu:

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional.
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana system jaringan transportasi.
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan oprasional perhubungan.

#### **4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dimana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai rincian tugas adalah:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan komunikasi dan Informasi dan tugas pembantuan yang di berikan oleh pemerintah, Memimpin dan menngkoordinasikan seluruh kegiatan aparat dan staf dinas.
  1. Menyusun rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informasi.
  2. Menyusun kebijakan pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan informasi.
  3. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bagian sekretariat, bidang angkutan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas, keselamatan teknik sarana dan prasaran, dan kominfo.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan fungsi dinas dalam rangka menyelenggarakan rincian tugas tersebut diatas adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum.
3. Panyusunan rencan kerja, pemantauan dan evaluasi
4. Pembinaan dan pelaporan.
5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.





- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun peran serta rencana strategis dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah agar pelaksanaan Pembangunan dan pengemabangan sektor Perhubungan dapat berlangsung secara berkesinambungan dan komperhensif maka perlu di susun untuk suatu Rencana (Renstra) dengan adanya Renstra diharapkan terasedia pedoman serta arah kebijakan yang hendak dicapai oleh Dinas yang dalam hal ini dituangkan dalam program lima tahunan, Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mengambil kebijakan-kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai yang berada di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru untuk memperoleh pelatihan dan pendidikan teknis baik dibidang perhubungan maupun Kesekretariatan.
- b. Melakukan pengajuan rekrutmen tenaga yang memiliki potensi dan kemampuan teknis dibidang perhubungan.
  1. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan keterpaduan pemberian beberapa perizinan dan rekomendasi bidang perhubungan pada pelayanan satu atap, yaitu badan pelayanan terpadu.
  2. Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang bersifat massal dan menjadi angkutan pemadu moda transportasi.
  3. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas yang juga meliputi sarana dan prasarananya.

f. Peningkatan peran serta masyarakat, pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tata tertib berlalu lintas dan melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan kepada penyedia jasa angkutan.

Memperluas jangkauan jaring pelayanan melalui komunikasi dan informasi yang luas sampai ke pelosok kota.

Penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang dan barang yang tidak laik jalan, tidak memiliki izin, dan melanggar tata tertib berlalu lintas.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

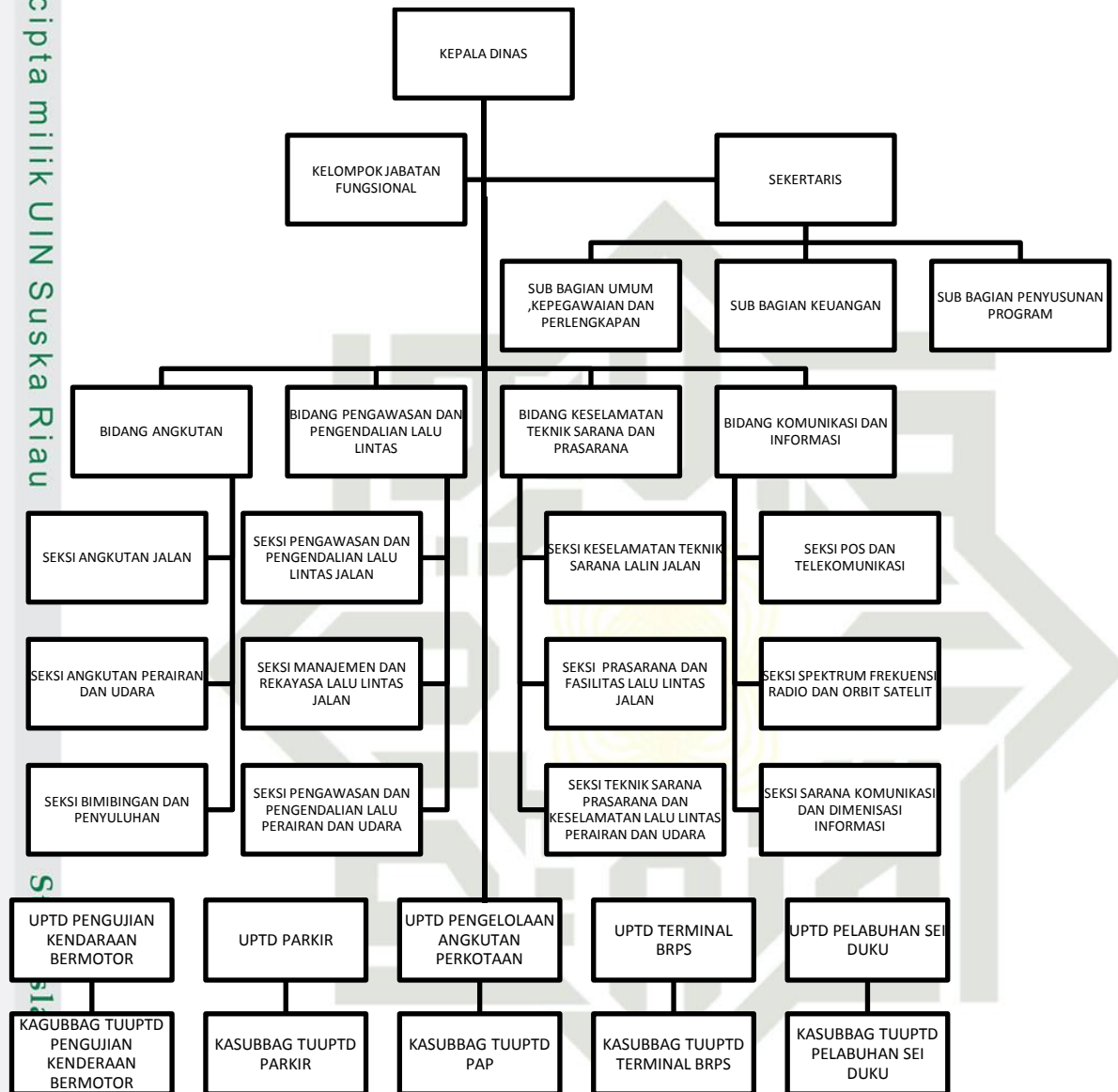
#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

#### 4.6 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.



##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap kendaraan bertonase besar di jalan umum Kota Pekanbaru, meliputi Standar Operasional Prosedur yang di terapkan mulai dari pengawasan Daya angkut, Pengawasan Jalur tertunjuk dan Pemeriksaan buku Uji Kendaraan serta kerjasama dengan Balai Pengelolot Transportasi Darat bersama aparat Kepolisian demi mengoptimalkan pengawasan yang di lakukan bahkan tidak hanya itu ada pula sanksi juga yang di terapkan demi memberikan efek jera terhadap pelanggar,

Menganai Standar Operasional Prosedur Pengawasan yang di lakukan oleh mulai dari pengawasan muatan daya angkut, pengawasan trayek tertunjuk atau rute jalan. Dapat di ketahui bahwasannya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengawasannya dapat dikatakan belum optimal, yang dimana hasil tindakan penilaian belum mencapai hasil yang diharapkan, seperti masih banyak ditemukan adanya kendaraan truk bertonase berat yang melakukan pelanggaran rute jalan, dan adanya kendaraan yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan jalan bagi kendaraan barang (truk) sebagaimana diatur dalam UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Perda Riau Nomor 5 Tahun 2013 yang dimana pengendara masih melakukan pelanggaran overdimensi maupun overloading atau melebihi muatan atau ukuran kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan walaupun dalam pemekrisaan buku layak uji pengendara kebanyakan



memilikinya, bahkan sering terjadi kekosongan pos perbatasan kota yang mengakibatkan kendaraan yang mangkir dapat lolos dari tindakan petugas penjaga bahkan walaupun Dinas Kominfo melakukan kerjasama dengan balai pengelola transportasi darat dan Kepolisian tapi nyatanya pengawasan terhadap kendaraan bertonase besar belum optimal karna kelalaian petugas dalam pengawasan di lapangan.

Sanksi yang di di jatuhkan kepada pelanggar juga masih tergolong ringan yang dimana pada peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang pengawasan dan pengendalian muatan lebih, di dalamnya tertera denda yang di jatuhkan kepada pelanggar sebesar Rp 50.000-100.000 per kilogram serta tindak pidana terberat hanya kurungan paling lama 4 bulan, itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa masih banyak pengendara kendaraan bertonase besar yang masih banyak melanggar apa yang sudah di tetapkan pemerintah.

## 6.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan agar menjadi masukan terkait peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan kendaraan bertonase besar di kota Pekanbaru antara lain ialah.

1. Diperlukannya Pengkajian oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru beserta Pimpinan Balai Pengelola Transportasi Darat dan Kepolisian mengenai permasalahan pengawasan kendaraan bertonase besar yang masih belum efektif juga padahal sudah menjain kerjasama maupun koordinasi..

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Diperlukannya peraturan maupun tindak tegas oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap petugas lapangan yang melakukan kelalaian seperti meninggalkan pos petugas sehingga pengendara bertonase besar masih banyak yang lolos dari pengawasan petugas.
3. Diperlukannya pemanfaatan teknologi modern terkini demi menunjang pembinaan atau sosialisasi terhadap pengendara bertonase besar seperti papan pemberitahuan digital yang memuat pentingnya mematuhi aturan dan kamera CCTV yang di pasang guna memantau/mengawasi pengendara yang melewati ruas jalan Kota Pekanbaru.
4. Diperlukannya Peraturan/Sanksi yang baru dan lebih tegas agar pengendara yang melakukan pelanggaran dapat jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Implementasi Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Agus Dwiyanto. (2015). *Mewujudkan Good Governance*. Yogyakarta:UGMpress.
- Ahmad Faried dan Syamsu Alam. 2012. *Study Kebijakan Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Al Qur'an dan Terjemahan
- Atep Adya Barata. (2016). *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Baridwan, Zaki, 2002. *Sistem Akuntansi (Penyusunan Prosedur dan Metode)*.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Edisi Pertama*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Dwi Narwoko, J dan Suyanto Bagong. 2013. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta : Kencana .
- Ekowati Lilik, Mas Roro, 2008 *Perencanaan. Implememasi dan Evaluasi Kebijakan Atau Program*, Pustaka Cakra, Surakarta
- Hardiansyah. 2014. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moenir. (2014). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Narwoko Dwi, J dan Suyanto Bagong (editor).2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi Ketiga*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nia Rahmayanty (2014). *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nugroho D, Riant. 2012. *public Policy*. Jakarta : Gramedia.
- Soekanto Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*. Jakarta: Rineke Cipta
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitati Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suarta,Edi.2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Mifta. 2001, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasi*, Jakarta : Rineke Cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung. Alfabeta.

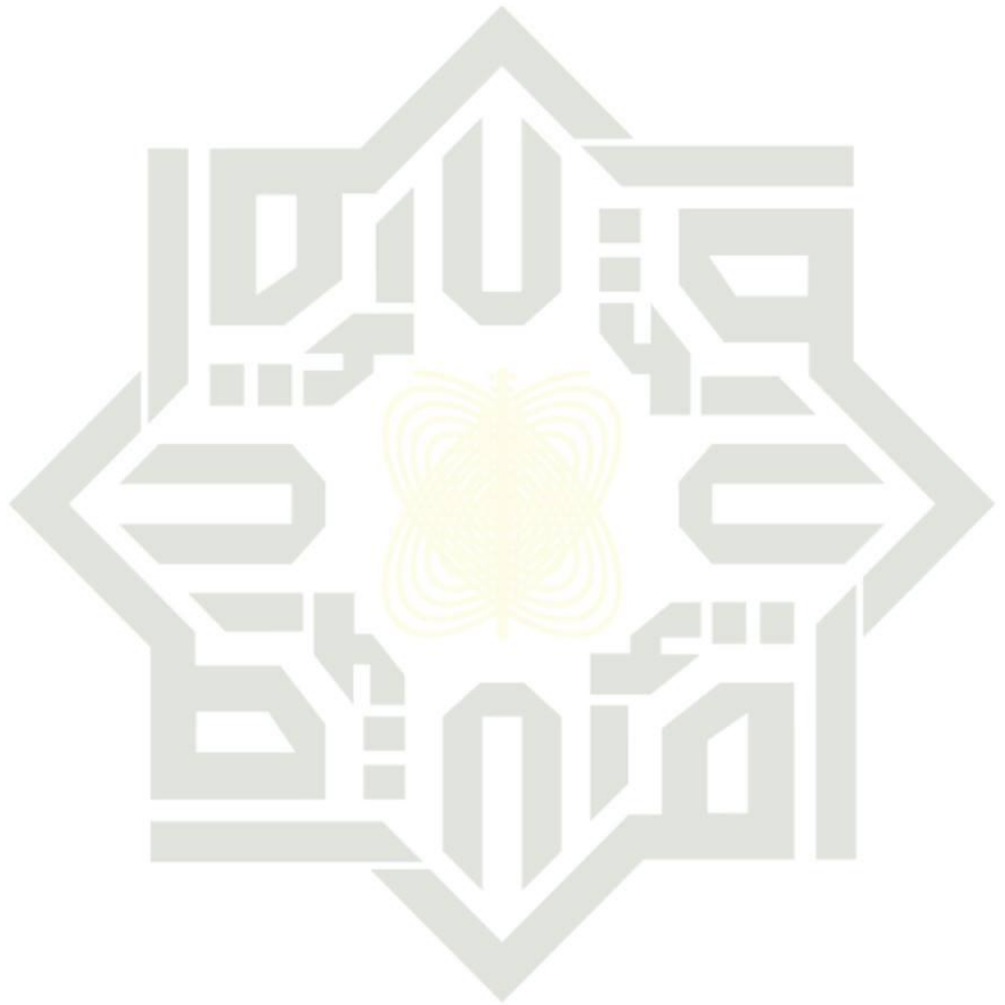
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalam

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang *Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus*.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005 Tentang *Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Kepala Bidang Manajemen Kaya Lalu Lintas



Wawancara dengan Staff UPTD Penguji Kendaraan Bermotor



Wawancara Dengan Petugas Lapangan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

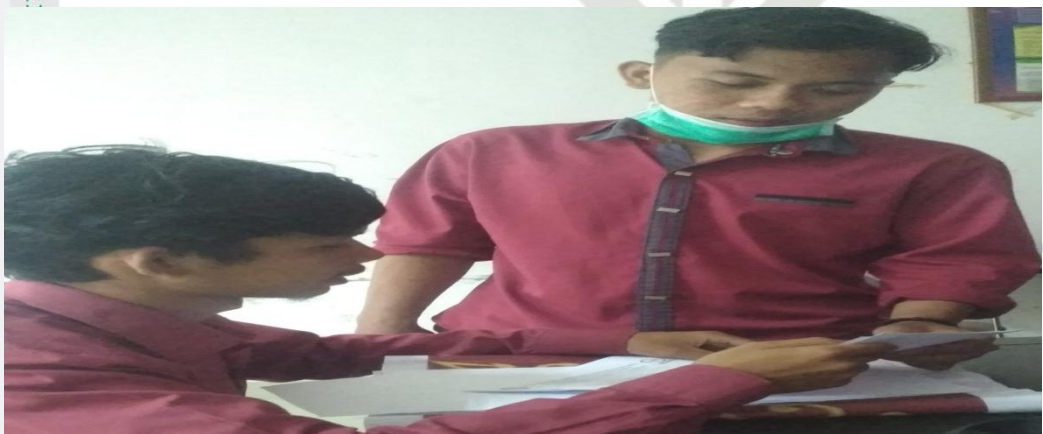
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Kendaraan Melakukan Penimbangan dengan Jembatan Timbang



Dokumentasi Pelaksanaan Pengjian Kendaraan Bermototr



Wawancara Dengan Masyarakat Kota Pekanbaru



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Dr. Sutomo No. 88 Telp. (0761) 21819  
PEKANBARU



### SURAT KETERANGAN

Nomor : 591/MRU - PLU / XI / 2019 / 112

Berdasarkan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 071/BKBP-PEKOM/2019/2519 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.

Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **BUDI GUNAWAN**  
 NIM : 11575103005  
 Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Jenjang : Strata 1  
 Lokasi Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan riset penelitian pada Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Judul "**ANALISIS PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN KENDARAAN BERTONASE BESAR DI KOTA PEKANBARU**".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 11 NOVEMBER 2019

KEPALA BIDANG MANAJEMEN  
REKAYASA LALU LINTAS

**EDISOFYAN, A.Ma PKB, SE, M.Si**  
 NIP. 19661103 198903 1 005





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

**REKOMENDARI PENELITIAN**

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/2519



232018

- a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/25121 tanggal 7 Agustus 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **BUDI GUNAWAN**
2. NIM : 11575103005
3. Fakultas : **EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU**
4. Jurusan : **ADMINISTRASI NEGARA**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **DESA GADING SARI KEC. TAPUNG-KAMPAR**
7. Judul Penelitian : **ANALISIS PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN KENDARAAN BERTONASE BESAR DI KOTA PEKANBARU**
8. Lokasi Penelitian : **DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 7 Agustus 2019

a.n. **PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DAN POLIKOTA PEKANBARU**  
 SEKRETARIS  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**H. MAHSI SCO, S.Sos, M.Si**  
 NIP. 19710514 199403 1 007

Terbaca  
 Disampaikan Kepada Yth :  
 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
 2. Yang Bersangkutan.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



Budi Gunawan lahir di Pekanbaru Provinsi Riau pada tanggal 23 Oktober 1997. Penulis merupakan anak kedua dari Bapak Solihin dan Ibu Irawati. Penulis menyelesaikan pendidikan pada tahun 2009 di SDN 035 Indrapuri, kemudian penulis melanjutkan pendidikan selanjutnya MTs Himmataul Ummah dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan di MA Himmatul Ummah dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi. Penulis memulai pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun ajaran 2015/2016 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara.

Penulis menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Koto Tandun, Kecamatan Tandun. Pada tanggal 18 November 2019 menjadi hari bersejarah bagi penulis karena telah melaksanakan ujian Munaqasah dan dinyatakan lulus dengan predikat **Sangat Memuaskan** dan layak menyandang gelar Sarjana Sosial (SOS) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.